

SKRIPSI

TINJAUAN SOSIO YURIDIS TENTANG KEBERADAAN BANTUAN POLISI (BANPOL ATAU PAK OGAH) DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2014 – 2016)



OLEH :

NUR FACHRI MALIK

B 111 12 009

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TENTANG KEBERADAAN
BANTUAN POLISI (BANPOL ATAU PAK OGAH) DI KOTA
MAKASSAR. STUDI KASUS TAHUN 2014-2016.**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Serjana Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**OLEH:
NUR FACHRI MALIK
B 111 12 009**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIO YURIDIS TENTANG KEBERADAAN BANTUAN POLISI (BANPOL ATAU PAK OGAH) DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2014-2016)

disusun dan diajukan oleh

**NUR FACHRI MALIK
B 111 12 009**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 3 Juni 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof.Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM.

NIP.19680411 199203 1 003

Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **NUR FACHRI MALIK**

Nomor Induk : **B 111 12 009**

Jurusan : **HUKUM PIDANA**

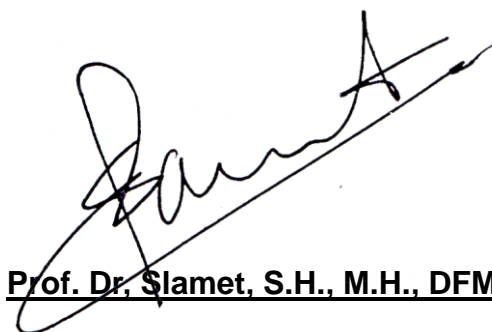
Judul : **TINJAUAN SOSIO YURIDIS TENTANG
KEBERADAAN BANTUAN POLISI (BANPOL ATAU
PAK OGAH) DI KOTA MAKASSAR. STUDI KASUS
TAHUN 2014–2016**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Juni


2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19680411 199203 1 003



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NUR FACHRI MALIK
Nomor Pokok	: B11112009
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi (Banpol) Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2016



a.n. Dekan

a.n. Dekan

Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH

NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

NUR FACHRI MALIK (B11112009), Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Keberadaan Bantuan Polisi (Banpol/Pak Ogah) di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016) dibimbing oleh Bapak Slamet Sampurno sebagai pembimbing I dan Ibu Hj Nur Azisa sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang keberadaan Bantuan Polisi (BANPOL/PAK OGAH) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Yang Diperjelas Oleh Fungsi Kerja Dari Babinkamtibmas Kepolisian Republik Indonesia dan untuk mengetahui faktor pendorong maraknya “Pak Ogah” atau bantuan (BANPOL) di kota Makassar.

Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes dan Polsek di wilayah hukum Kota Makassar. Dengan mewawancarai Banpol yang berkaitan dengan kasus ini serta Polsek setempat yang terdapat Banpol / Pak Ogah di wilayah Polsek tersebut. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Secara istilah keberadaan “Pak Ogah” tidak memiliki alas hukum. Tidak ada satupun ada kata “Pak Ogah” dalam undang yang menjadi acuan untuk meligitimasi eksistensi pak ogah, hanya saja digunakan kata Bantuan Polisi (Banpol) yang pendekatannya lebih kepada fungsi kepolisian sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Fungsi Kepolisian sebagai Babinkamtibmas yang meliputi Bimmas (Bimbingan Masyarakat). Fungsi Babinkamtibmas kepolisian sebagai bagian dari lembaga kepolisian memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Babinkamtibmas adalah terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan ikut melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga ketertiban dan keamanan. 2.) Penyebab sehingga seseorang kemudian memilih Pak Ogah sebagai suatu profesi alternatif karena terkait dengan masalah faktor ekonomi atau kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pengalaman kerja yang kurang memadai, sampai adanya imitasi (peniruan) atau sekadar ikut-ikutan khususnya untuk anak-anak. Lain halnya dengan bantuan polisi, Bantuan Polisi merupakan salah satu bentuk kreatifitas Kepolisian dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat yang mau membantu kinerja kepolisian di lapangan khususnya di Kota Makassar.

ABSTRACT

NUR FACHRI MALIK (B11112009), Overview of Socio Juridical Presence Of Police Assistance (Banpol / Pak Ogah) in Makassar (Case Study Years 2014-2016) led by Mr. Slamet Sampurno as supervisor I and Ibu Nur Azisa as supervisor II.

This study aims to determine how the regulations about the existence of the Police Assistance (BANPOL / Pak averse) according to Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation and Law No. 2 Year 2002 on the Indonesian National Police Yang Defined Functions By Work From Babinkantibmas the Indonesian National Police and to determine the factors driving the rise of "Pak averse" or assistance (BANPOL) in the city of Makassar. The research location is in Polrestabes and police in the jurisdiction of the city of Makassar. By interviewing Banpol relating to this case as well as the local police who are Banpol / Pak averse in the police region.

The data obtained were then processed and analyzed descriptively, results showed that: 1) In terms of being "Pak averse" has no legal bases. None of the words "Pak averse" in the legislation is the reference to legitimize the existence of the pack averse, just use the word Police Assistance (Banpol) whose approach is more to the functioning of the police as part of the implementation of Law No. 22 of 2002 on Traffic and Transportation. Police functions as Babinkamtibmas covering Bimmas (Community Guidance). Babinkamtibmas police function as part of a police agency has a specific purpose. The goal in Babinkamtibmas activity was the realization of security and public order situation by involving communities directly participated in maintaining order and security. 2.) Causes so that one then choose Pak averse as an alternative profession because of issues related to economic factors or poverty, low education levels, inadequate work experience, until their imitation (impersonation) or simply went along, especially for children , As with the help of the police, the Police Assistance is one form of creativity Police in providing assurance hukumterhadap people who want to help the performance of the police in the field, especially in the city of Makassar.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Keberadaan Bantuan Polisi (Banpol/Pak Ogah) di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016), yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Hasanuddin. Salam dan salawat senantiasa di panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, sebagai *Rahmatallilalamin*.

Skripsi ini dapat diwujudkan dalam bentuk yang sekarang melalui tahap penelitian dan berkat upaya kerja keras penulis akhirnya dapat diselesaikan.

1. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku pembimbing II. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. serta selaku penguji I, Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku penguji II dan bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku penguji III atas segala bimbingan, arahan, perhatiannya dan dengan penuh kesabaran, ketulusan yang diberikan kepada penulis.

2. Tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Abd Malik Musdini, yang selalu menjadi panutan penulis serta kerja kerasnya yang selalu mendukung penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum dan bisa menegakkan kebenaran dan Ibunda Herlina Tjolli atas dukungan dan pengorbanannya baik moral dan moril serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis sepanjang hidupnya serta tak pernah lelah dalam membimbing penulis, walaupun sampai saat ini penulis belum bisa membalasnya. Serta buat saudara-saudaraku, Nur Ilham Malik, Jumriani Malik, Kurnia Malik, Rita Fatimah Malik yang selalu jadi motivasi dan panutan.
3. Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III, dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, tak lupa pula staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Khususnya Bagian Pidana yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Seluruh staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu bersedia membantu penulis selama melakukan penulisan dan mengumpulkan data secara kepustakaan, serta, Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku penasehat di semester akhir penulis selaku Penasehat Akademik

selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada staf Polrestabes Kota Makassar, atas segala bantuannya dalam proses skripsi ini, Kasat Lantas Polrestabes Makassar, dan Banpol atau Pak Ogah, yang memberikan bantuan selama mengadakan penelitian.
5. Ucapan terimah kasih penulis juga sampaikan kepada teman-teman angkatan Petitem 2012 dan Tim Halte terima kasih atas kerja sama dan motifasinya selama ini dan sampai sekarang ini. Sahabat-sahabatku Oni, Lupis, Hilman, Takwa, Ca', Pidu, Aan, dan Sigit, terkhusus buat yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang penuh kepada penulis dalam penulisan skripsi, dan Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Center (HLSC) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi kebanggaan, serta yang Selalu ada dr. Alfirah Zainal yang banyak-banyak memberi dukungan, waktu, bantuan dan do'a-nya buat penulis dalam memulai, menjalani, dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga sumbangan dan bantuan dari semua pihak mendapat rahmat dan karuniannya yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, Juni 2016

Wassalam,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
A. Hukum Kepolisian	7
1. Istilah Polisi Dan Kepolisian	7
2. Landasan Yuridis Kepolisian NRI	10
3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian NRI	14
B. Polisi, Hukum, Dan Masyarakat	19
C. Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	22
D. Bantuan Polisi (BANPOL)	34
 BAB III METODE PENELITIAN	 37
A. Lokasi Penelitian	37
B. Populasi Dan Sampel	37
C. Jenis Dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Eksistensi Bantuan Polisi (BANPOL) Ditinjau Dari Aspek Yuridis	42
B. Faktor Pendorong Maraknya Pak Ogah atau Bantuan Polisi (BANPOL) di Kota Makassar	53
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu masyarakat berkembang dari masyarakat komunal menjadi masyarakat modern. Perkembangan masyarakat (*social evolution*) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Herbert Spencer, point utama mengenai masyarakat ada pada institusi sosial yang memiliki tiga fungsi (*the function of social institution*).¹ Fungsi pertama adalah fungsi menopang yang dijalankan oleh sistem pemerintahan. Fungsi ini mengendalikan lapangan kerja untuk anggota masyarakat dan membuat sekaligus menerapkan hukum kepada anggota masyarakat.

Fungsi kedua adalah fungsi distribusi yang dijalankan oleh sistem ekonomi. Fungsi ini mendistribusikan lapangan kerja ke setiap anggota. Fungsi ketiga adalah fungsi pertahanan yang menjaga dan mempertahankan keamanan masyarakat. Fungsi ini dijalankan oleh tentara dan polisi. Ketiga sistem yang menjalankan fungsi dari lembaga sosial tersebut akan saling membutuhkan satu sama lain.

Indonesia sebagai suatu negara yang merupakan entitas masyarakat modern di dalamnya tentu memiliki ketiga fungsi dari institusi sosial sebagaimana yang diutarakan oleh Spencer. Namun masyarakat

¹ George Ritzer, 2003, *Teori Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm. 60.

Indonesia juga memiliki sistem nilai. Sistem nilai yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat yang menjadi patokan tingkah laku setiap anggotanya. Dalam masyarakat primitif, nilai yang mengikatnya adalah nilai-nilai adat. Sedangkan suatu masyarakat modern diikat oleh nilai-nilai konstitusi.

Masalah yang dihadapi pada hari ini adalah bagaimana mengintegrasikan antara institusi sosial dalam menjalankan fungsinya (*the function of social institution*) dengan sistem nilai yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara (*the general goals of society*). Melihat permasalahan integrasi sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya dapat dipilah menjadi tiga sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang terkait peranan institusi sosial yang ada di masyarakat menjalankan fungsinya. Sudut pandang kedua adalah sudut pandang terkait kesadaran dan ketaatan anggota masyarakat terhadap sistem nilai yang dianutnya. Sedangkan sudut pandang ketiga adalah sinergitas kinerja institusi sosial dalam menjalankan fungsinya terkait peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap sistem nilai yang dianut anggota masyarakat.

Banyaknya institusi sosial yang berada di dalam masyarakat membuat penulis menentukan fokus penelitian hanya pada institusi kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum. Sebagaimana yang telah penulis utarakan terkait permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia pada hari ini, permasalahan yang esensial dalam

penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka, *as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty*.

Di Indonesia bahasa hukum yang digunakan untuk menyebut institusi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian NRI). Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merumuskan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.

Kepolisian kemudian didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) sebagai berikut, “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Salah satu peran Kepolisian NRI adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada Pasal 1 angka 5 UU Kepolisian dirumuskan, “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Berdasarkan uraian pada Pasal 1 angka 5 UU Kepolisian, Kepolisian NRI yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Kepolisian NRI dalam menjalankan peran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat harus memiliki kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Lebih lanjut dalam UU Kepolisian pada Pasal 3 disebutkan:

Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka selain Kepolisian NRI, terdapat juga beberapa jabatan yang dapat melaksanakan fungsi kepolisian, salah satunya ialah pengamanan swakarsa. Di dalam masyarakat pengamanan swakarsa biasa dapat dilihat dalam bentuk Bantuan Polisi (BANPOL). Istilah ini merujuk pada segilintir orang yang bekerja membantu tugas kepolisian dalam suatu masyarakat. Tugas-tugas yang dimaksud sangat beragam, mulai dari tugas mengatur lalu lintas, hingga melakukan pelaporan terkait adanya dugaan tindak pidana. Pentingnya tugas dari BANPOL ini tidak sejalan dengan kepastian dari status hukumnya, BANPOL bukanlah aparat sipil negara, sehingga gaji yang diterimanya bergantung pada kontrak kerjanya dengan pihak Kepolisian NRI yang terkadang di bawah upah minimum regional.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan sebagai latar belakang penelitian ini, maka penulis merumuskan sebuah judul penelitian, yaitu: **“Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Keberadaan Bantuan Polisi (BANPOL ATAU PAK OGAH) Di Kota Makassar “**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu:

1. Apakah dasar hukum yang menjamin Eksistensi Bantuan Polisi (BANPOL) atau Pak Ogah di Kota Makassar ?
2. Apakah yang menjadi faktor pendorong maraknya Bantuan Polisi (BANPOL) atau Pak Ogah di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang keberadaan Bantuan Polisi (BANPOL) atau Pak Ogah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong maraknya “Pak Ogah” atau Bantuan Polisi (BANPOL) di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Sebagai bahan rujukan baik kepada penegak hukum, akademisi hukum, dan masyarakat umum demi meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kepolisian

1. Istilah Polisi Dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan "*politeia*", di Inggris "*police*" juga dikenal adanya istilah "*constable*", di Jerman "*polizei*", di Amerika dikenal dengan "*sheriff*", di Belanda "*politie*", di Jepang dengan istilah "*koban*" dan "*chuzaisho*" walaupun sebenarnya istilah "*koban*" adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* yang merupakan pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata "polisi" telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni "*politeia*". Kata "*politeia*" digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni "*Politeia*" yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.²

Agar kehidupan masyarakat di kota dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. Norma-Norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.³ Dilihat dari sisi historis, istilah

²Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, hlm. 19.

³ Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, hlm. 154.

“polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Istilah Polisi menurut Raymond B. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Menurut Steinmetz bahwa untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut pegawai Polisi.⁴ Dari arti istilah Polisi tersebut di atas, bila diinterpretasikan, maka pengertian Polisi sebagai organ dalam melaksanakan tugas organ Polisi serta dilaksanakan oleh pejabat Polisi sebagai manusia dalam melaksanakan peraturan hukum baik sebagai hukum formal maupun sebagai hukum materil untuk mewujudkan tujuan organ Polisi yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Secara etimologis hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda “*Politie Recht*”, Jerman “*PolizeiRechts*” dan Inggris “*Police Law*”, yang kemudian di Indonesia disinonimkan menjadi “Hukum Kepolisian”. Istilah Hukum Kepolisian terdiri dari dua suku kata “hukum” dan “kepolisian” yang

4 *Ibid.*, hlm. 154

masing-masing kata dapat diberi makna secara terpisah. Jika berpijak pada istilah hukum adalah suatu norma atau kaidah yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka dapat ditarik pemahaman, bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Negara Republik Indonesia adalah Negara bekas jajahan Belanda termasuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang masalah polisi banyak diciptakan oleh Belanda. Hukum Kepolisian di Indonesia mengikuti paham Belanda, yaitu "*Politea Recht*", yang berarti sejumlah peraturan hukum yang mengatur hal polisi, baik segala tugas, fungsi maupun organ. Di dalam hukum Kepolisian terdapat dua arti, yaitu hukum Kepolisian dalam arti Materil adalah hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi dan hukum Kepolisian dalam arti Formal adalah hukum yang mengatur polisi sebagai organ.⁵ Istilah hukum Kepolisian di Indonesia adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata Hukum dan Kepolisian. Menurut kamus WJS Poerwadinata, menjelaskan bahwa kata Kepolisian berarti urusan polisi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi.

5 Yesmil Anwar, *op.cit.*, hlm. 155.

Jadi, menurut arti bahasa hukum, Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi.⁶

Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat Negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas yang menjadi penjaga tiranialisme sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu, maka negara yang bersangkutan dinamakan juga “Negara Polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu bentuk negara “*Politea*”, dimana pemisahan POLRI dari ABRI pada tanggal 1 April 1999 belum menjadi jaminan untuk terwujudnya Negara berdasarkan kedaulatan rakyat, apabila proses perubahannya masih pada pola Negara kepolisian seperti pada masa lampau yang dimana diidentikkan dengan kekuasaan tirani.⁷

2. Landasan Yuridis Kepolisian NRI

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian NRI, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional

⁶ *Ibid.*, hlm. 156.

⁷ *Ibid.*, hlm. 161.

Indonesia (TNI) dan Kepolisian NRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, maka yang terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian NRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian NRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang realitas tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian NRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ketika terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Kepolisian NRI maka kedua badan tersebut harus bekerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NRI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian NRI secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya Penyidik pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas Subsidiaritas dan Asas partisipasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian NRI, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian NRI

memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepolisian mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan pejabat Kepolisian NRI secara menyeluruh dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM).

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi, demikian jelas ketentuan bagi setiap anggota Kepolisian NRI wajib mempedomani dan menaati ketentuan undang-undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian NRI wajib pula memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua, serta Peraturan

Perundang-Undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian NRI.

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian NRI

Sebelum memaparkan tugas dan wewenang Kepolisian NRI, terlebih dahulu harus disebutkan fungsi dan tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian NRI). Menurut Pasal 2 UU Kepolisian, fungsi dari Kepolisian NRI adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian NRI merupakan suatu bagian integral dari pemerintah yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Jika Tujuan Hukum adalah menciptakan ketertiban di dalam interaksi antar anggota masyarakat, maka Kepolisian NRI merupakan alat yang berfungsi untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

Selanjutnya Pasal 4 UU Kepolisian, merumuskan tujuan dari Kepolisian NRI, yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Mengenai tugas Kepolisian NRI diatur pada Pasal 13 dan 14 dan wewenangnya pada Pasal 15, 16, 17, 18, dan 19 UU Kepolisian.

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

- I. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

B. Polisi, Hukum, Dan Masyarakat

Dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Achmad Ali menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum:

“Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya.”⁸

Masih berkaitan dengan eksistensi polisi, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa yang paling besar frekuensinya dalam berhubungan secara langsung dengan masyarakat adalah polisi, dibandingkan dengan penegak hukum lainnya.⁹ Sejalan dengan hubungan antara hukum dan masyarakat, Montesquieu mengatakan bahwa hukum merupakan suatu bagian integral dari kebudayaan masyarakat tertentu. Hukum merupakan hasil dari berbagai faktor dalam masyarakat, misalnya adat istiadat, lingkungan fisik, dan perkembangan masa lampau sehingga hukum hanya dapat dimengerti di dalam karangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang.¹⁰

Penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara polisi, hukum, masyarakat terletak pada pelayanan polisi terhadap masyarakat dalam hal

⁸ Achmad Ali, 1988, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, hlm. 203.

⁹ *Ibid.*, hlm. 209.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 7.

penegakan hukum di dalam kerangka kehidupan masyarakat dimana hukum itu berkembang. Masih dalam kaitannya dengan hubungan antara polisi dan masyarakat di dalam buku panduan tugas Binatra Polri diatur mengenai padoman bagi Binatra Polri dalam meningkatkan budaya pelayanan kepada masyarakat:¹¹

- a. Berupa mengenal masyarakat;
- b. Melaksanakan standart pelayanan masyarakat, seperti senyum, salam, sapa, serta teknis yang benar;
- c. Senang meminta arahan dari pimpinan agar lebih mampu melaksanakan standart pelayanan masyarakat;
- d. Menaati dan melaksanakan standart pelayanan tugas yang telah di tentukan;
- e. Menyarankan kepada kawan atau pimpinan upaya atau kiat pelaksanaan pelayanan yang lebih baik, sesuai pengalaman sendiri atau kawan lain, dan aktif memberikan saran dan pengalaman pada saat diskusi atau gugus kendali mutu;
- f. Sasaran tugas, bicarakan dengan pimpinan, cara kiat terbaik untuk melaksanakannya;
- g. Berani dan bersedia serta bertekad melaksanakan tugas yang telah disepakati bersama pimpinan;
- h. Meminta bantuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran yang telah di sepakati;
- i. Gunakan secara efisien, rawat secara baik, semua peralatan dan dukungan yang dipercayakan;
- j. Aktif memberikan masukan dan saran tiap pertemuan diskusi;

¹¹ Harun R., 2007, *Peranan Aparat Kepolisian Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Makassar*, hlm 23-25.

- k. Bertanggung jawab dengan baik setiap tugas yang di percayakan, jadikan setiap tugas sebagai kehormatan, laporkan hasil pelaksanaan tugas;
- l. Laksanakan setiap tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun struktur tugas kurang pas;
- m. Sampaikan realita, apa adanya kepada pimpinan, jangan asal bapak senang;
- n. Berani menyampaikan saran kepada pimpinan bila ada tugas yang bukan merupakan tugas pokok satuan;
- o. Sadari bahwa pekerjaan kita merupakan bagian dari keseluruhan, upayakan agar tugas yang kita laksanakan berhasil, sehingga tugas kesatuan secara keseluruhan menjadi berhasil pula;
- p. Bantu pimpinan untuk memelihara dan meningkatkan penggunaan secara lebih efisien seluruh sumber daya yang di berikan dalam rangka melayani masyarakat;
- q. Bantu pimpinan dengan memberikan data yang sebenarnya dalam hal ada kegiatan supervise, sadari bahwa supervise adalah untuk peningkatan pelaksanaan tugas organisasi;
- r. Laksanakan dengan baik rencana kerja yang telah di tentukan;
- s. Teladani hal-hal yang sudah di arahkan dan dilaksanakan oleh pimpinan;
- t. Bekerja maksimal, berupaya menjadi prajurit kebanggaan Pimpinan dan Masyarakat;

Lain halnya dengan ketertiban, hukum dan ketertiban sering mengalami benturan, terutama terlihat pada tugas polisi yang mendua. Di lain sisi, pihak polisi bertugas untuk memelihara ketertiban, disisi lain, polisi bertugas untuk menegakan hukum dengan kata lain, tugas pihak kepolisian bukan sekedar menjaga legal order, melainkan juga menjaga ketertiban dan ketentraman warga masyarakat. Tugas ganda ini kadang-kadang menyulitkan polisi memilih alternatif jika harus menghadapi seorang residivis yang kejam dan tidak sudi menyerah. Pada Hakikatnya Polisi adalah petugas yang diberi wewenang untuk menjalankan kekerasan demi tugasnya. Jadi kita tidak usah terlalu heran kalau sekali-

sekali polisi terpaksa melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya. Di sini kadang-kadang hukum berburu dengan ketertiban.¹²

C. Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada pelanggaran lalu lintas sehingga terjadi kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Keadaan ini terjadi karena beberapa faktor seperti pengguna jalan, sarana jalan dan kendaraan, serta sikap pemerintah dalam penegakan hukum lalu lintas. Walaupun demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya, tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu dan penanganan dari pemerintah dalam hal ini polisi lalu lintas terhadap pelanggaran seperti ini masih jauh dari harapan.

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting, namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan

¹² Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pretama, hlm. 76.

raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan.¹³ Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian, tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Namun dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum efektif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian lalu lintas. Kenyataan dalam sehari-hari dalam hal penerapan atau penegakan undang-undang lalu lintas belum maksimal karena dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan, pada kenyataan yang ada, anggota kepolisian hanya meminta uang komisi kepada pelaku pelanggaran sebagai jaminan untuk tidak dilakukan penilangan, dan uang tersebut digunakan sebagai uang saku pribadi anggota polisi tersebut. Hal ini banyak terjadi sesuai dengan kenyataan bahkan pengakuan dari para pelaku pelanggaran.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang lalu lintas ini masih lemah baik terhadap undang-undangnya, maupun juga dari penegak hukumnya, sehingga penerapan undang-undang ini tidak berjalan efektif. Seharusnya, Undang-Undang bahkan

¹³ Andrew R Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa, hlm. 27.

Penegak Hukumnya, harus dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas.

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan yakni sebagai, “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sejalan dengan pemerintah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Sehingga, dalam penerapan hukum lalu lintas harus mempunyai komponen agar bisa terjadi interaksi lalu lintas, yaitu sebagai berikut:

a. Manusia Sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam penerapan hukum pelanggaran lalu lintas diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa diorganisasi dengan baik sehingga penerapan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Penulis mencoba menjabarkan penerapan yang penulis analisis dalam Pasal 245 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu dengan konsep sebagai berikut:

1) Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan:

- a) Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan.
- b) Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.
- c) Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda.
- d) Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

2) Perencanaan Lalu Lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program

perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

3) Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas

Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

4) Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas

- a) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada

ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

- b) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

5) Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas

- a) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
- b) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas

Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana. Dalam hal terjadi suatu perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran, maka tugas pemerintah adalah menegakkan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam UU LLAJ mengatur mengenai pelanggaran dan juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Banyak diantara warga pengguna jalan raya atau sebagai pengendara roda empat maupun roda dua tidak mengetahui isi dari UU LLAJ yang telah berlaku sejak tahun 2010 lalu. Padahal dalam UU LLAJ ini, terdapat daftar pelanggaran dan denda maksimal bagi warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengelompokkan subyek pelaku dan bentuk pelanggaran, diantaranya:

1) Berlaku Bagi Setiap Orang

Mengakibatkan gangguan pada: Fungsi rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi dikenakan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 50.000. jo pasal 28 ayat (2) Rp. 250.000. dalam pasal ini memberikan penjelasan bahwa

setiap orang yang oleh karena perbuatannya mengakibatkan hal tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana.

2) Setiap Pengguna Jalan

Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp. 250.000. Untuk itu penerapan Pasal ini khusus terhadap para pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan kepada pengguna jalan.

3) Setiap Pengemudi

Disini di tujukan kepada setiap pengendara yang tidak, memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)) di kenakan pidana kurungan 4 bulan dan denda Rp. 1.000.000. tidak membawa SIM (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b) dikenakan pidana kurungan 1 bulan dan denda Rp. 250.000. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a. Rp. 500.000. Tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)) dikenakan pidana kurungan 2 bulan dan denda Rp. 500.000. Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain ; bumper tanduk atau lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal (58)) dikenakan

pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp. 500.000. Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan (Pasal 289 jo Pasal 106 Ayat (6)) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp. 250.000. Tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 293 ayat (1) jo pasal 107 ayat (1)) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp. 250.000, apabila akibat yang ditimbulkan oleh karena hal tersebut, mungkin akan lebih berat jumlah pidananya. Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain (Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) huruf h) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp. 250.000. Selain sepeda motor mengemudikan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7)) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp. 250.000. Untuk yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir (Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf e) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp. 250.000. Yang Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf (g) atau pasal 115 huruf (a)) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp 500.000. Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo pasal 112 ayat (1) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp 250.000. Tidak memberikan isyarat saatakan

ber[pindah lajur atau bergerak kesamping (Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2)) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp.250.000. Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan (Pasal 287 ayat (1) jo pasal 106 (4) huruf (a) dan Pasal 106 ayat (4) huruf (b)) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp 500.000. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (Pasal 287 ayat (2) jo pasal 106 (4) huruf (c)) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau Rp 500.000. Mengemudi tidak Wajar-Melakukan kegiatan lain saat mengemudi dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan (Pasal 283 jo pasal 106 (1)) dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 750.000. Mengemudikan Kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain (Pasal 296 jo pasal 114 huruf (a)) dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau Rp 750.000. Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan (Pasal 298 jo pasal 121 ayat (1) 500.000. Tidak memberi prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh petugas Polri adalah sebagai berikut:

- (1) Kendaraan Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
- (2) Ambulans yang mengangkut orang sakit
- (3) Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- (4) Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
- (5) Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga internasional yang menjadi tamu Negara
- (6) Iring-iringan Pengantar Jenazah
- (7) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI. Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135. Rp 250.000. Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 jo 106 ayat (2) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp 500.000.

Atas penjelasan tersebut untuk penerapan khususnya sanksi dapat dilakukan dengan proses acara biasa, singkat dan cepat. Penyidikan dilakukan oleh kepolisian, kemudian oleh kepolisian di limpahkan kekejaksaan oleh kejaksaan dibuatlah surat dakwaan kemudian oleh terdakwa dapat melakukan pleidoi/surat pembelaan atas dakwaan, kemudian pembuktian dan terakhir adalah putusan. Atas putusan tingkat pertama dapat dimintakan permohonan banding ke pengadilan tinggi, selanjutnya atas putusan pengadilan tinggi dapat dimintakan permohonan kasasi ke mahkama agung, oleh putusan kasasi, masih dapat mengajukan

PK sebagai upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan oleh terdakwa atas putusan kasasi. Proses selanjutnya adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim oleh Kejaksaan.

D. Bantuan Polisi (BANPOL)

Ditinjau dari UU kepolisian dan UU LLAJ, tidak ditemukan satupun kata atau istilah BANPOL. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan ketika membahas definisi hukum, tugas dan kewenangan, serta urgensi dari BANPOL itu sendiri. Keberadaan BANPOL secara sederhana merupakan wujud dari kurangnya personil kepolisian dalam suatu masyarakat. Namun tugas dan kewenangan BANPOL secara hukum tidak jelas sampai dimana batas-batasnya.

Berdasarkan Pasal 3 UU Kepolisian, dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Kepolisian, Kepolisian NRI dapat dibantu oleh beberapa pihak, yaitu kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Namun setiap pembantu polisi ini menjalankan fungsi kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Itulah yang dirumuskan secara normative dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Kepolisian. Namun ketika melakukan *legal research* penulis tidak menemukan satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan BANPOL.

Apabila yang dimaksud sebagai BANPOL ialah apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, maka terlebih dahulu harus dilihat apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam UU Kepolisian. Bagian penjelasan umum UU Kepolisian mendefinisikan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian NRI, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Berdasarkan definisi bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di atas, maka jelaslah BANPOL bukan bagian dari bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. BANPOL tidak dibentuk oleh kesadaran masyarakat, namun lebih pada kemauan perseorangan, kemudian BANPOL tidak bekerja pada suatu lingkungan masyarakat tertentu, tetapi pada lalu lintas jalan tertentu. Selain itu BANPOL juga bukan produk dari suatu badan usaha penyedia jasa pengamanan.

Ketidakjelasan mengenai status hukum BANPOL inilah yang menjadi salah satu fokus penelitian penulis. Hal ini penulis anggap penting demi mencegah adanya permasalahan hukum yang nantinya dapat ditimbulkan dari keberadaan BANPOL, konflik kepentingan mungkin saja terjadi antara kepolisian NRI, BANPOL, dan masyarakat. Selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan terhadap BANPOL itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar di wilayah hukum Kota Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam skripsi ini adalah di Kepolisian Resor Wilayah Makassar. Sampel dalam skripsi ini adalah BANPOL di Kepolisian Resor Wilayah Makassar.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli

yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka (*Library Research*), Observasi (*Observation*), dan Wawancara (*Interview*).

1. Studi Pustaka (*Library Research*) merupakan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan penulis bahas.
2. Observasi (*Observation*), pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengamatan tidak terlibat (*nonparticipant observation*), dalam menggunakan metode ini pengamat tidak menjadi anggota dari kelompok yang diamati. Oleh sebab itu, kehadiran pengamat di tengah-tengah kelompok yang diamati jangan sampai mempengaruhi

kelompok tersebut, sehingga data yang diperoleh bukan merupakan keadaan yang sesungguhnya. Demi menghindari hal tersebut, maka peneliti akan memperhatikan dua hal. Pertama, peneliti harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keadaan sosial budaya dari kelompok yang diamati; kedua, ketika berada di tengah-tengah kelompok tersebut, harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kelompok tersebut

3. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dari sudut pandang bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang peneliti lakukan digolongkan sebagai wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer, sekunder, tersier, akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, diuraikan tentang permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Pokok permasalahan yang dimaksud adalah, “apakah dasar hukum yang menjamin eksistensinya Bantuan Polisi (BANPOL) atau Pak Ogah dan faktor pendorong marak dan menjamurnya Banpol atau Pak Ogah di Kota Makassar berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan wawancara dengan turun langsung, sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap obyek dengan bantuan dan komunikasi bersama instrument-instrumen yang berada dalam obyek yang dibahas secara efektif dan sinergitas ?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah diadakan penelitian dengan menggunakan hasil pengamatan, observasi, dan hasil wawancara dari pihak kepolisian di Polrestabes dan beberapa Polsek di Kota Makassar, serta beberapa oknum dari pihak Banpol atau Pak Ogah itu sendiri sebagai obyek permasalahan. Hasil tersebut digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan selanjutnya data tersebut dianalisis.

Hasil analisis tersebut, diberikan penilaian yang dapat memberikan gambaran dan kepastian tentang apa dasar hukum yang menjamin eksistensi dan faktor pendorong maraknya Bantuan Polisi (Banpol) atau Pak Ogah di Kota Makassar.

A. Eksistensi Bantuan Polisi (BANPOL) atau Pak Ogah di Tinjau Dari Aspek Yuridis.

Sebelum dikenal istilah Bantuan Polisi yang merupakan penyesuaian secara yuridis, Bantuan Polisi dalam perspektif sosiologis dikenal dengan sebutan “Pak Ogah”. Dalam menelusuri asal muasal munculnya istilah Pak Ogah, penulis mencoba melakukan pendekatan budaya “*Cultural Studies*”. Hal yang menarik adalah bahwa istilah Pak Ogah ternyata terinspirasi dari salah satu tokoh dalam serial film serial Boneka Indonesia yaitu Si Unyil. Salah satu tokoh dalam film tersebut selain Si Unyil dan Pak Raden ada tokoh lain yaitu Pak Ogah yang terkenal dengan ungkapannya “Cepek dulu dong”, karena ketenaran seri Si Unyil, kata Pak Ogah kemudian memasuki wahana populer dan menjadi istilah umum untuk menyebut semua tunakarya yang lebih senang bermalas-malasan atau melakukan pekerjaan ringan. Misalnya, di perempatan jalan yang sibuk, sering kali karena satu alasan atau yang lain, tidak adanya petugas [polisi](#) yang mengatur lalu lintas, seseorang yang bukan petugas kepolisian namun kemudian mengatur arus kendaraan di tikungan jalan, pertigaan atau perempatan, dan di jalan yang rawan kemacetan yang meminta atau mengharapkan uang sebagai imbalan sering disebut "Pak Ogah". Kata “Ogah” kemudian diasosiasikan dengan karakter malas.¹⁴

¹⁴Azmi zul Ghosyi “Relasi Mutualisme “Pak Ogah” dengan Polisi dalam menjaga Keamanan Jalan Mayor Suryotomo, Kota Yogyakarta. Data Pdf.

Menurut The Strait Times, Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), di putaran jalan (*U-turns*) dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam bukunya *Violent conflict in Indonesia* Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas. Keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas menuai pro dan kontra, pandangan yang pertama, menyatakan keberadaannya sangat membantu karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan dapat mengurai kemacetan sedangkan pandangan yang lain, menganggap kegiatan Pak Ogah kadang kala dapat memperparah kemacetan dan bahkan melakukan tindakan-tindakan paksa untuk dibayar. Jika Persepsi Masyarakat antara mengatasi kemacetan dan tindakan ilegal memang dipengaruhi oleh karakteristik situasional yang masuk akal untuk mempertimbangkan hal ini ketika menelisik adanya dukungan masyarakat terhadap Pak Ogah ataupun sebaliknya. Setelah semua, dukungan tersebut dapat mencakup penilaian keefektifan mengatasi kemacetan. Pro kontra tindakan aksi Pak Ogah dinilai sebagai suatu pelanggaran, Pak Ogah sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan. Tanggapan atas persepsi ini disikapi oleh masyarakat dan terkait dukungan lainnya memang akan dipengaruhi oleh aspek situasi Pak Ogah itu sendiri.¹⁵

¹⁵Nursalam, dkk. 2015. Persepsi Masyarakat terhadap eksistensi Pak Ogah. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosologi : FKIP Unismuh Makassar. Data Pdf. Hlm 224.

Fenomena “Pak Ogah” itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui secara mendalam tentang Persepsi masyarakat dan bagaimana kedudukan hukumnya, apakah legal atau tidak terhadap keberadaan Pak Ogah. Kehadiran Pak Ogah dapat dinyatakan bahwa, Pak Ogah tersebut baiknya ditiadakan meski menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan dan pro kontra dari masyarakat. Namun kegiatan Pak Ogah tersebut tetaplah ilegal dari sudut pandang yuridis. Ada beberapa teori yang dapat dikaitkan tentang persepsi masyarakat dengan penyebab munculnya Pak Ogah di jalan. Kehadiran Pak Ogah di jalan tentu menuai pro dan kontra dalam masyarakat pada umumnya, namun demikian kegiatan tersebut tetaplah ilegal dan tidak sah untuk dilaksanakan. Meski kita tidak melihat dampak yang begitu besar dengan hadirnya Pak Ogah tersebut namun tetap kehadiran Pak Ogah nyata kita rasakan dan apabila diabaikan keberadaannya akan memengaruhi sistem yang ada dalam masyarakat ke depan, seperti yang diungkap pakar sosiolog dalam teorinya struktural fungsional, menyatakan bahwa, suatu sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat. Dengan demikian, pada tingkat tertentu, misalnya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan, diperlukan oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori ini memusatkan

perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikan sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan. Begitu pula yang terjadi dalam masyarakat, bahwa kehadiran Pak Ogah di dalam masyarakat tentu memiliki fungsi, namun keberadaannya dapat mengganggu sistem yang ada dalam masyarakat meskipun perlahan-lahan, namun dapat membawa perubahan dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan cara untuk menyelesaikan agar masyarakat tetap dalam keseimbangan.¹⁶

Keberadaan Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) yang kemudian pada perkembangannya disesuaikan dan dikaitkan dengan sudut pandang fungsi Kepolisian sebagai Bimmas (Bimbingan Masyarakat) yang direposisi predikatnya dengan sebutan Bantuan Polisi (Banpol). Hal ini tentu bertujuan, bagaimana supaya terminologi Pak Ogah dapat ditafsirkan dalam bahasa hukum untuk menyesuaikan istilah tersebut secara yuridis. Berikut Hasil wawancara penulis dengan Bintara Polantas Polrestabes Makassar, Aiptu Syahrul :¹⁷

“Bahwa Keberadaan Bantuan Polisi itu tidak di atur dalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2002, tidak ada tentang keberadaan Bantuan Polisi (Banpol) atau Pak Ogah, tetapi keberadaannya ditinjau dari sudut pandang fungsi Bimmas. Ada program yang melakukan bimbingan kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri, untuk mengambil tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan tetapi tidak mempunyai fungsi untuk melakukan pungutan atau imbalan melainkan inisiatif masyarakat yang di dalamnya ada asas kemanfaatan.”

¹⁶*Ibid.*, Hlm 224.

¹⁷ Hasil Wawancara Tanggal 15 Maret Pukul 10:00

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, Bantuan Polisi (BANPOL) keberadaannya tidak ada jaminan secara yuridis atau dalam artian tidak memiliki undang-undang sebagai alas hukum. Pendekatannya lebih kepada fungsi kepolisian sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fungsi Kepolisian sebagai Babinkamtibmas yang meliputi Bimmas (Bimbingan Masyarakat). Fungsi Babinkamtibmas kepolisian, sebagai bagian dari lembaga kepolisian memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Babinkamtibmas adalah terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan mensukseskan pembangunan nasional. Sedangkan, yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat

adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹⁸

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Bimbingan Masyarakat (Bimmas) POLRI pada dasarnya merupakan segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan per-Undang-undangan dan norma-norma sosial lainnya serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa. Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di

¹⁸Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

Hasil wawancara Penulis dengan narasumber lain, Bintara Hukum Polrestabes Makassar Aiptu Reski Yospiyah memberikan penjelasan:

“Bantuan Polisi atau Pak Ogah itu bisa lahir dan dikehendaki oleh kepolisian itu sendiri karena adanya program kerja dari Babinkamtibmas yang memberdayakan masyarakat, Bantuan polisi sebagai improvisasi dalam bentuk positif demi mencapai tujuan kepolisian yakni memberdayakan masyarakat. Bantuan Polisi difasilitasi untuk memberdayakan SDM dalam setiap wilayah yang lahir dari masing-masing Babinkamtibmas, ketika kekosongan dalam mengatur lalu-lintas jalan pada saat itulah bantuan polisi (Banpol) dibutuhkan. Tentu yang dikedepankan dalam hal ini adalah asas kemanfaatan”.¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menguraikan berapa hal bahwa terminologi Pak Ogah adalah sebuah istilah dalam bahasa sehari-hari atau bagian dari budaya, bukan sebuah terminologi hukum, sementara bantuan polisi (BANPOL) merupakan masyarakat biasa yang dipekerjakan untuk membantu tugas polisi. Dari hasil pemaparan di atas bahwa BANPOL atau Pak Ogah tujuannya untuk membantu kelancaran lalu lintas (mengatur arus lalu lintas, mengatasi kemacetan dan sejenisnya). Kalau untuk pemeriksaan surat-surat dan penyitaan surat kendaraan, jelas bukan wewenang mereka. Banpol tidak memiliki kewenangan lain misalnya operasi lalu lintas, menanyakan surat-surat, masyarakat bisa mempertanyakan dasar kewenangannya dan atas perintah siapa jika terjadi hal di luar dari kewenangan Banpol itu sendiri.

¹⁹Hasil Wawancara Tanggal 15 Maret Pukul 11:00

Lebih lanjut, Bantuan Polisi (BANPOL) bukan PNS atau pegawai pemerintahan yang lain, melainkan mereka bersifat sukarela. Kalau memang digaji, itu merupakan honor yang diberikan secara swadaya/pribadi dari pimpinan polisi dimana ia berada. Keberadaan Banpol merupakan inisiatif POLRI atau masyarakat sebagai bentuk pengamanan swakarsa yang juga diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002. Tugasnya membantu polisi, mengingat saat ini POLRI masih kekurangan personil untuk mengkoordinir seluruh kegiatan masyarakat yang semakin kompleks, maka POLRI sebagai pengayom masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal.

Mengacu pada asas legalitas, “Bahwa tidak ada sesuatu yang dikenakan sanksi, dianjurkan, diperintahkan tanpa adanya peraturan yang mengatur sebelumnya”. Karakteristik asas legalitas ini kemudian mengatur semua perihal pidana dalam *Criminal Justice Sistem* di Indonesia. Kaitannya dengan keberadaan Pak Ogah atau Banpol tanpa ada alas hukum jelas, maka konsekuensinya sudah pasti dikategorikan sebagai suatu hal yang *illegal*. Illegal yang dimaksud, tidak hanya ditafsirkan sebatas karena tidak adanya alas hukum yang mengatur, akan tetapi bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap kaidah atau norma hukum itu sendiri.

Secara sosio yuridis, konsekuensi-konsekuensi objektif yang bersifat disfungsional akan menyebabkan timbulnya ketegangan atau pertentangan dalam sistem sosial. Dalam kaca mata struktural

fungsionalisme, akan ada ketegangan yang muncul akibat adanya saling berhadapan antara konsekuensi yang bersifat disfungsional. Dengan adanya ketegangan tersebut, maka akan mengundang munculnya struktur dari yang bersifat alternatif sebagai substitusi menetralkan ketegangan. Perlu diketahui bahwa adanya ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan adanya struktur-struktur baru tersebut akan berarti bahwa konsekuensi objektif yang bersifat disfungsional itu akan mengakibatkan adanya perubahan-perubahan sosial. Di samping itu, disfungsi juga akan menyebabkan timbulnya anomie dan masalah sosial. Kenyataan tersebut juga mengandung arti timbulnya struktur-struktur baru yang pada hakikatnya menunjukkan adanya perubahan sosial yang mengarah pada perbaikan tatanan dalam masyarakat.

Selain dari hasil wawancara di atas, penulis juga melakukan wawancara di Polsek Panakukang oleh Kasi Hukum Aiptu Armin menyatakan bahwa:

“Dari sisi yuridis sebenarnya ilegal, tetapi melihat dari sisi positifnya bahwa Pak Ogah bisa membantu kinerja Polisi di lapangan. Pernah ada perintah dari atasan pembagian rompi yang dikenakan diatasnamakan Bantuan Polisi (Banpol), tetapi dihentikan pemberian fasilitas rompi tersebut, karena sudah bukan pada tujuan awalnya alias, condong mengarah ke arah yang negatif atau lebih tepatnya menyerupai sikap premanisme”.²⁰

Sementara Di Polsek Manggala Ipda Daniel T (Babinkamtibmas) menyatakan bahwa:

²⁰ Hasil wawancara tanggal 15 Maret pukul 10.00

“Melakukan operasi yang dilimpahkan kepada Polrestabes, tetapi melihat perbaikan dari maksud diadakannya operasi itu masih memperlihatkan tidak adanya tanda-tanda adanya efek jerah atau perbaikan, karena terkait persoalan Pak Ogah itu hal yang mutlak ilegal walaupun pada awalnya kepolisian mengkehendaki lahir dan beroperasinya Pak Ogah tersebut, bahkan ada beberapa Polsek yang memfasilitasi Pak Ogah dengan rompi yang bertuliskan (BANPOL) Bantuan Polisi Polrestabes”.²¹

Dari pemaparan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Pak Ogah merupakan suatu hal yang ilegal kedudukannya secara hukum. Kalaupun selama ini ada menurut hasil wawancara penulis yang bisa simpulkan itu adalah sebuah program bagaimana melibatkan masyarakat secara langsung untuk membantu kinerja kepolisian di lapangan sebagai bagian dari integrasi kepolisian dengan masyarakat secara umum.

Jauh sebelum Bantuan Polisi (BANPOL) muncul di tengah-tengah masyarakat, kepolisian dalam hal ini Kapolri itu sendiri sudah memiliki aturan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas Polri yang dimana dalam Pasal 7 bagian Bab III tentang konsepsi Polmas bagian kesatu Tujuan Polmas :

Pasal 7

- (1) Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban

²¹ Hasil wawancara tanggal 17 Maret pukul 11.45

masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- (2) Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan.
- (3) Kemitraan polisi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan.
- (4) Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk aktif menemukan, mengidentifikasi menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius.²²

Penulis juga melakukan penelusuran melalui media lokal terkait upaya pemerintah kota makassar dalam menangani permasalahan keberadaan Pak Ogah di Kota Makassar. Dalam penelusuran tersebut, penulis menemukan fakta bahwa pernah ada upaya dalam meminimalisir jumlah Pak Ogah di Kota Makassar melalui Program *Citizen report* melalui kehadiran ke 150 personel untuk mengatur kendaraan di jalan agar tidak macet. Hanya saja sifat momentumis karena berkaitan dengan acara muktamar Muhammadiyah pada bulan Juli Tahun 2015. Pada momentum

²²Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI

itu Pemerintah selaku stake holder melalui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak kepolisian mengharapkan personel *citizen report* ini memberikan pelayanan kepada tamu, bukan sekedar mengatur arus lalu lintas, tetapi bisa juga menjadi agen kota dalam hal kriminalitas. Selain menjadi informan bagi tamu, sehingga tidak ada yang tersesat.²³

Dari rangkaian hasil penelitian penulis, maka yang perlu penulis tekankan adalah istilah BANPOL (Bantuan Polisi), jangan sampai hanya sekedar cara untuk melegalkan kerja para Pak Ogah, meskipun adanya peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pemolisian Masyarakat. Seharusnya secara kelembagaan kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus menemukan solusi bukan hanya pada tataran membuat aturan secara internal dalam kelembagaan karena adanya kekosongan hukum dalam hal pengaturan tentang bantuan polisi, akan tetapi bagaimana berorientasi pada upaya pelayanan kepada masyarakat tanpa harus membuat aturan main sendiri. Karena hal tersebut bisa saja akan menyisakan standar ganda dalam penegakan hukum termasuk dalam ranah hukum pidana secara umum walaupun pekerjaan atau sesuatu yang Banpol atau Pak Ogah itu lahirkan di masyarakat ada pada maksud dari peraturan Pemolisian Masyarakat tersebut. Karena untuk seperti yang dimaksud dalam aturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Polmas, cerminan yang Banpol munculkan masih jauh dari maksud dan tujuan aturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008

²³<http://rakyatku.com/2015/07/30/citizen-report/citizen-report-cara-pemkot-makassar-usir-pakogah.html>. di akses Pada Tanggal 22 Maret Pukul 13:00.

tentang Polmas tersebut. Pada akhirnya keputusan berada pada pihak Pemerintah dan Kepolisian untuk mencari solusi yang ideal dan efektif untuk menyelesaikan problem keberadaan Banpol atau Pak Ogah yang semakin menjamur dan tidak terkendali keberadaannya di tengah masyarakat.

B. Faktor Pendorong Maraknya Bantuan Polisi (BANPOL) atau Pak Ogah di Kota Makassar.

Maraknya keberadaan Pak Ogah tidak bisa terlepas dari masalah sosial. Beragam variabel menjadi faktor penyebab munculnya Pak Ogah atau akhir-akhir ini kemudian direposisi sebutannya menjadi Bantuan Polisi. Meskipun kemiskinan berpengaruh banyak, akan tetapi kemiskinan bukan satu-satunya variabel yang menyebabkan munculnya Pak Ogah sebagai salah satu alternatif untuk mencari nafkah. Masih ada variabel-variabel lain yang menjadi penyebab seperti kurangnya lapangan pekerjaan yang mampu dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, adanya segmen tersendiri dalam pasar tenaga kerja, baik berdasarkan usia, tingkat pendidikan, keahlian, maupun pengalaman kerja.²⁴

Faktor yang melatarbelakangi munculnya Pak Ogah Di Kota Makassar, diantaranya adalah Kebutuhan hidup semakin hari kian meningkat, terutama yang hidup di kota-kota besar biaya hidup mereka

²⁴Bagong Suyanto, 2013. "Masalah Sosial Anak". Edisi Revisi Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm 131.

lebih mahal dibandingkan yang tinggal di desa, mengapa? karena segala sesuatunya hanya mampu diperoleh dengan cara dibeli, kalau kata orang kota "hidup di kota ngak ada uang = nggak makan". Tentunya butuh usaha dan kerja untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari tersebut. Namun tidak semua orang memiliki nasib yang sama, yakni sama-sama memiliki modal dan pengetahuan untuk mereka kembangkan agar menjadi modal untuk berpenghasilan. Ada beberapa orang yang butuh perjuangan keras agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan pengetahuan lebih ini hanya mampu mengintai apa yang mampu mereka kerjakan agar dapat pula menghasilkan uang.



Diliriknya satu profesi ini, yakni juru putar atau akrab di sapa dengan "Pak Ogah". Profesi ini dilirik sebagian orang yang pengangguran, putus sekolah atau sifatnya hanya situasional, karena tidak menuntut ijazah dan pendidikan yang tinggi untuk melakoninya, apabila telah

memiliki sumprit dan mengenakan rompi seperti gambar di atas, dan berdiri di sudut atau tikungan jalan dengan maksud membantu pengendara roda empat untuk memutar atau membelokkan kendaraannya, maka itu disebut sebagai Pak Ogah atau tukang juru putar. Biasanya kita akan menjumpai si Pak Ogah ini di setiap putaran arah jalan raya dengan maksud membantu pengendara mobil ataupun kendaraan lainnya untuk memutar atau membelokkan kendaraan tersebut yang tentunya jasa mereka mengharapkan untuk diberi upah dengan uang pada umumnya. Situasi ini menjadi suatu kebiasaan yang bukan hanya sistem atau cara kerja Pak Ogah saja yang terus berlanjut, tetapi jumlah upah Pak Ogah juga ikut berdasarkan kebiasaan dari perkembangan sampai dikisaran mulai dari Rp 1.000, Rp 2.000 hingga Rp 5.000. Akan tetapi semua kembali kepada pengendara kendaraan atau masyarakat yang melihat dari sudut pandangnya masing-masing, walaupun asas kemanfaatan ada dalam cara kerja dari Pak Ogah tersebut untuk diberikan upah atau paling tidak kata terima kasih atau membunyikan klakson kendaraan sebagai salah satu cara berterima kasih berdasarkan kebiasaan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak informan atau Pak Ogah itu sendiri yang biasa beroperasi di sekitaran wilayah kota Makassar tepatnya di sekitaran Jl. Poros Perintis Kemerdekaan. Penjelasan dari Pak Ogah yang inisialnya AK menyatakan bahwa:

“Melakukan pekerjaannya dengan hanya bermodalkan peluit, topi untuk menahan panasnya terik matahari pada siang hari, serta

rompi yang bertuliskan BANPOL yang membuatnya berani dan percaya diri setiap kali melakukan pekerjaannya itu. Dalam 5 (lima) menit sedikitnya tercatat kurang dari 4 (empat) sampai 7 (tujuh) kendaraan yang melintas. Apabila sedang padat-padatnya jumlah kendaraan tentunya lebih banyak lagi. Pekerjaan Pak Ogah ini juga mempunyai jam kerja efektif rata-rata 8 jam dalam sehari. Saudara AK juga menambahkan bahwa dia memilih pekerjaan ini karena tidak menuntut pendidikan, syarat dan pengalaman kerja untuk melakukannya. Saudara AK juga menambahkan bahwa hasil dari pekerjaannya ini sebagai Pak Ogah hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya saja untuk bertahan melanjutkan hidupnya”.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka penulis dapat memperjelas secara komprehensif bahwa faktor yang paling menonjol maraknya Pak Ogah di Kota Makassar disebabkan karena adanya peluang untuk mendapatkan uang dengan mudah dengan kondisi situasional di jalan. Kemudian pekerjaan Pak Ogah tersebut terbilang mudah tanpa harus membawa ijazah pendidikan untuk memperoleh pekerjaan tersebut, karena kebutuhan sehari-hari mereka yang tidak mampu dipenuhi tanpa bekerja, sehingga dipililah pekerjaan Pak Ogah ini, serta pengangguran karena tidak memiliki pendidikan sehingga mereka memilih untuk mengais rezeki dengan cara pintas menjadi Pak Ogah, serta tidak adanya ketegasan yang totalitas dari pihak yang berwenang untuk memberhentikan aktivitas Pak Ogah tersebut.

Sementara berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian. Bintara hukum Polrestabes kota Makassar Aiptu Reski Yospoiah bahwa :

²⁵ Hasil Wawancara tanggal 17 Maret Pukul 13.30

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya Pak Ogah atau Bantuan Polisi (Banpol), salah satu hal yang dominan adalah sebagian masyarakat khususnya melihat ini sebagai salah satu alternatif untuk mencari nafkah. Seorang Pak Ogah menggantungkan kehidupannya dari upah atas jasa membantu melancarkan pengendara roda empat untuk membelokkan kendaraanya, karena mereka menganggap bahwa inilah pekerjaan yang mereka mampu lakukan di luar keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Adapun dari mereka yang memilih untuk bekerja sebagai Pak Ogah ini hanya untuk sekedar mencari uang semata agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya untuk belanja/makan sehari-hari. Jadi, jelas kegiatan Pak Ogah adalah ilegal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, lain halnya jika kita menyebut itu sebagai Bantuan Polisi maka itu adalah inisiasi dari polisi itu sendiri yang merupakan perwujudan dari kamtibmas, program ini melibatkan masyarakat dalam bentuk pemberian atribut bisa berupa rompi Bantuan Polisi dengan maksud dan tujuan membantu kinerja kepolisian di lapangan”.²⁶

Berdasarkan wawancara di atas maka penulis dapat memberikan penjelasan bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang masih dominan sifatnya. Ini juga didukung dengan tingkat pendidikan yang rendah. Lain halnya dengan upaya pemberian atribut secara formil, itu adalah salah satu upaya dari pihak kepolisian sendiri. Bantuan Polisi sebagai bagian dari *supporting sistem* kepada masyarakat untuk mendukung kinerja kepolisian di lapangan.

Dalam persepsi masyarakat, sebagian menganggap membutuhkan profesi Pak Ogah, karena dianggap membantu para pengendara dalam menghadapi kemacetan ataupun bagi kendaraan yang ingin berbelok atau berputar arah dan juga bagi masyarakat yang ingin menyebrang jalan. Namun, banyak juga masyarakat yang sering dibuat resah dengan adanya

²⁶ Hasil wawancara tanggal 20 Maret pukul 10.00.

profesi tersebut terutama masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua, karena saat mereka ingin berputar arah, masyarakat yang mengendarai roda empat lebih diutamakan dibandingkan pengguna kendaraan roda dua, karena pengguna roda empat atau yang lainnya pasti memberikan mereka upah. Selain itu ada juga masyarakat yang menganggap bahwa profesi Pak Ogah terhubung dengan premanisme dan anak jalanan yang suka memalak para pengguna jalan, namun tidak semua profesi Pak Ogah terkait dengan premanisme karena para pemuda yang berprofesi sebagai Pak Ogah hanya untuk mencari uang hanya untuk mengisi perut untuk mempertahankan hidupnya.

Jaringan Pak Ogah ini masuk ke dalam golongan massa apung. Massa apung juga dikenal dengan sektor informal yaitu masyarakat yang pekerjaannya tidak tetap dan beraneka ragam. Penghasilan mereka juga disebut Ever sebagai ekonomi subsisten karena penghasilan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan primer (pokok) mereka saja dan penghasilan mereka juga tidak akan membuat mereka menjadi kaya atau dapat memenuhi kebutuhan sekundernya. Istilah “perekonomian subsisten” umumnya digunakan khusus dari perekonomian desa agraris yang produktivitasnya rendah. Jaringan Pak Ogah ini juga dapat dikatakan sebagai kewirausahaan subsisten. Kewirausahaan Subsisten adalah orang atau sekelompok orang yang dapat menangkap peluang usaha yang ada di lingkungan sekitarnya. Sektor subsisten terjadi karena melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan golongan kaya.

Massa apung tersebut terikat pada struktur administratif RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) yang berfungsi dengan baik.²⁷

Profesi Pak Ogah ini bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua pemuda saja, namun pekerjaan subsisten ini telah membuka jaringan yang mengakibatkan banyak pemuda yang tertarik dengan profesi ini, terutama bagi pemuda yang tidak mempunyai keahlian di bidang pekerjaan dan para pemuda yang mempunyai pendidikan yang rendah. Jaringan ini terbentuk karena rasa solidaritas sosial yang dibentuk oleh pemuda sekitar. Rasa solidaritas tersebut muncul karena adanya persamaan nasib antar pemuda tersebut dan adanya rasa pertemanan.

Sementara itu, terminologi Bantuan Polisi (BANPOL) adalah kata lain yang digunakan untuk menyebut profesi Pak Ogah menjadikan atau upaya untuk melegalisasi kerja Pak Ogah sebagai profesi dengan bentuk kesukarelaan, atau dalam artian tidak ada unsur paksaan dalam meminta upah kepada para pengguna jalan. Bantuan Polisi bahkan tidak ditemukan dalam undang-undang, melainkan Bantuan Polisi (BANPOL) hanyalah bentuk upaya melibatkan masyarakat sebagai bentuk upaya swakarsa dalam penegakan hukum. Bantuan Polisi tidak dibentuk oleh kesadaran masyarakat, namun lebih pada kemauan perseorangan, kemudian Bantuan Polisi tidak bekerja pada suatu lingkungan masyarakat tertentu, tetapi pada lalu lintas jalan tertentu. Selain itu Bantuan Polisi juga bukan produk dari suatu badan usaha penyedia jasa pengamanan, akan tetapi

²⁷Parsudi Suparlan, 2003. Kemiskinan di Perkotaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm 89.

merupakan bentuk kesukarelaan untuk membantu kerja kepolisian dalam perwujudan Kamtibmas.

Selain itu penulis juga melakukan penelusuran dengan mengakses informasi melalui informan atau Pak Ogah itu sendiri. Faktor pendorong yang menyebabkan para informan bekerja itu atas kemauan diri sendiri untuk mencari uang. Faktor mencari uang ini yang kemudian disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, karena untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, alasan ini menjadi hal yang utama karena umumnya informan berasal dari keluarga tidak mampu, bentuk-bentuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya primer seperti makan sehari-hari. Kedua, karena untuk pemenuhan konsumsi (jajan) sendiri, ini yang menjadi alasan bagi para informan yang berasal dari keluarga dengan kategori menengah ke atas atau bukan karena tuntutan kebutuhan primer, tetapi sekunder. Kebutuhan sekunder yang dimaksud itu, misalnya, untuk jajan membeli rokok, bermain game di warnet, atau bahkan membeli barang elektronik.

Selain itu, ada juga faktor pendorong yang menjadi penyebab informan bekerja sebagai Pak Ogah. Pertama, kenyamanan bekerja, hal ini disebabkan karena lingkungan pekerjaan yang merupakan teman-teman sebayanya khususnya untuk usia anak-anak dan remaja. Pada awalnya mereka ikut ataupun diajak oleh teman-temannya yang sudah terlebih dahulu menggeluti pekerjaan sebagai Pak Ogah. Dalam hal ini teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari melalui observasi, elemen inti dari observasi adalah modeling. Dalam hal

ini teman sebaya berpengaruh besar menjadi contoh bagi para informan untuk ikut menggeluti pekerjaan yang sama. Selain itu, variabel lain yang membuat mereka menjadi Pak Ogah adalah adanya kenyamanan karena waktu bekerjanya tidak ada yang mengatur dan atas dasar kemauan sendiri. Pekerjaan ini tidak membutuhkan keahlian khusus juga yang menjadi penyebab kenapa sebagian orang memilih pekerjaan ini sebagai salah satu alternatif untuk mencari nafkah.

Pada akhirnya digunakan kata Bantuan Polisi (BANPOL) untuk memberikan legitimasi secara hukum terhadap profesi “Pak Ogah”, itupun dengan catatan bahwa dibutuhkan tenaga sukarela yang mau membantu kinerja kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya pengguna jalan. Meskipun “Pak Ogah” yang pada umumnya dijadikan profesi karena terkait dengan masalah faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, pengalaman kerja yang kurang memadai, maka lain halnya dengan Bantuan Polisi. Bantuan Polisi merupakan salah satu bentuk kreatifitas Kepolisian dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat yang mau membantu kinerja kepolisian di lapangan. Mengingat bahwa terkadang ada momentum tertentu dan situasi tertentu yang membutuhkan keterlibatan masyarakat, seperti kurangnya personil kepolisian dalam suatu wilayah atau daerah tertentu.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir pada laporan hasil penelitian ini. Di dalamnya akan diungkapkan tentang kesimpulan dan saran yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan.

A. Kesimpulan

1. Secara istilah keberadaan “Pak Ogah” tidak memiliki alas hukum. Tidak ada satupun kata “Pak Ogah” dalam undang-undang yang menjadi acuan untuk meligitimasi eksistensi pak ogah, hanya saja digunakan kata Bantuan Polisi (Banpol) yang pendekatannya lebih kepada fungsi kepolisian sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan fungsi Kepolisian sebagai Babinkamtibmas yang meliputi Bimmas (Bimbingan Masyarakat). Fungsi Babinkamtibmas kepolisian sebagai bagian dari lembaga kepolisian memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Babinkamtibmas adalah terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan ikut melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Penyebab sehingga seseorang kemudian memilih Pak Ogah sebagai suatu profesi alternatif karena terkait dengan masalah faktor ekonomi atau kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pengalaman kerja

yang kurang memadai, sampai adanya imitasi (peniruan) atau sekadar ikut-ikutan khususnya untuk anak-anak. Lain halnya dengan bantuan polisi, Bantuan Polisi merupakan salah satu bentuk kreatifitas Kepolisian dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat yang mau membantu kinerja kepolisian di lapangan khususnya di Kota Makassar.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah melakukan kajian secara holistik khususnya kepolisian dan Dinas Perhubungan tentang keberadaan Pak Ogah sebagai suatu bentuk profesi baru sebab tidak memiliki alas hukum Kalau pemerintah memandang bahwa “Pak Ogah” tidak dibutuhkan maka perlu ditindak tegas dengan melakukan penertiban, akan tetapi jika pemerintah memandang “Pak Ogah” dibutuhkan maka perlu dibuatkan suatu aturan yang menjadi alas hukum, bisa melalui revisi Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan atau melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Untuk kota Makassar.
2. Diharapkan Pemerintah memperhatikan tingkat kesejahteraan dan Pendidikan khususnya masyarakat menengah ke bawah, membuka lapangan pekerjaan, Selain itu memberikan suatu keterampilan khusus agar masyarakat bisa diserap dalam berbagai bidang sebagai tenaga kerja. Khusus untuk Banpol kalau dibutuhkan maka pemerintah bisa membuat Pendidikan Latihan atau sejenisnya untuk membantu kinerja polisi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 1988. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Hasanuddin University Press. Ujung Pandang.
- , 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pretama. Jakarta.
- Azmi zul Ghosyi. 2013. *“Relasi Mutualisme “Pak Ogah” dengan Polisi dalam menjaga Keamanan Jalan Mayor Suryotomo, Kota Yogyakarta*. Data Pdf.
- Andrew R Cecil. 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Nuansa. Bandung.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesi: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. UI Press. Jakarta.
- Bagong Suyanto. 2013. *“Masalah Sosial Anak”*. Edisi Revisi Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- George Ritzer. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Harun R. 2007. *Peranan Aparat Kepolisian Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Nursalam, dkk. 2015. *Persepsi Masyarakat terhadap eksistensi Pak Ogah*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosologi : FKIP Unismuh Makassar.
- Parsudi Suparlan. 2003. *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. CV. Rajawali. Jakarta.

Yesmil Anwar. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjajaran. Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 45 / III / 2016 / Subbagkum

1. Rujukan :

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar Nomor : 764 / UN4.6/ PL.02/ 2016 tanggal 29 Januari 2016. Perihal permohonan izin penelitian.
- b. Disposisi Kapolrestabes nomor agenda : B / 268 / II / 2016 / Sium, tanggal 03 Februari 2016. Perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : NUR FACHRI MALIK
Nomor Pokok : B111 12 009
Program Studi : Hukum Pidana
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat kampus : Jl. Urip Sumiharjo Km 10, Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul :

“ ANALISIS YURIDIS TENTANG KEBERADAAN BANPOL (PA' OGA) DI KOTA MAKASSAR ”

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 14 Maret 2016

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABAGSUMDA POLRESTABES MAKASSAR**

Ub

KASUBAG HUKUM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fak. Hukum Unhas Makassar

BURHAN, S.Sos. S.H, MH
KOMISARIS POLISI NRP 64050217